



WORLD
RESOURCES
INSTITUTE

RINGKASAN EKSEKUTIF

HAUS AKAN KEADILAN

*Transparansi dan
Perjuangan Masyarakat
Miskin untuk Air Bersih di
Indonesia, Mongolia dan Thailand*

The
Access
Initiative

CAROLE EXCELL & ELIZABETH MOSES

WRI.ORG



Desain dan layout oleh:
Carni Klirs
cklirs@wri.org

KATA PENGANTAR

Air yang terkontaminasi merupakan akar masalah penyebab kematian, penyakit, dan disabilitas di seluruh dunia, di mana lebih dari 2 miliar orang masih menggunakan air yang tercemar untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan mata pencahariannya. Lebih dari 80 persen limbah cair di berbagai negara dibuang ke alam bebas tanpa pengolahan, sementara 300-400 juta ton logam berat, bahan pelarut, lumpur berbahaya, dan limbah lain dibuang ke aliran air di seluruh dunia setiap tahunnya. Jumlah ini dihasilkan hanya dari fasilitas industri saja tanpa disertai sektor-sektor lainnya.

Banyak negara dengan ekonomi berkembang mengalami kerugian ekonomi sekitar 2-4 persen Pendapatan Domestik Brutonya (PDB) akibat kematian dan penyakit yang disebabkan kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Akan tetapi ketidakterbukaan perihal macam dan jumlah bahan pencemar hasil kegiatan industri yang dibuang di negara-negara tersebut masih dianggap wajar saja. Volum limbah cair hasil kegiatan industri diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2025 (dari angka tahun 2007), dan melanjutkan skema 'bisnis seperti biasa' bukanlah suatu opsi yang bisa dibiarkan.

Masyarakat miskin pedesaan bergantung pada sumber air dari alam untuk mandi, masak, dan kebutuhan mata pencaharian lainnya seperti memancing, menggembala ternak, dan pertanian. Mereka terpapar dampak secara tidak proporsional oleh penyakit yang diakibatkan air yang tercemar. Akses terhadap informasi memadai tentang pencemaran air dapat membantu masyarakat dalam menentukan apakah air mereka aman untuk digunakan, sekaligus berpartisipasi secara berarti dalam proses pembuatan keputusan terkait saluran air yang mendukung kehidupan mereka, dan memastikan pertanggung jawaban dari pihak yang melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan.

Laporan Haus akan Keadilan: Transparansi dan Perjuangan Masyarakat Miskin untuk Air Bersih di Indonesia, Mongolia dan Thailand ini mengkaji akses terhadap informasi pencemaran air bagi masyarakat rentan di ketiga negara tersebut. Dari laporan ini, diketahui bahwa pengungkapan informasi spesifik terkait fasilitas, informasi mengenai kualitas air secara keseluruhan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan data mengenai kepatuhan masih lemah. Mekanisme yang digunakan untuk mengungkapkan informasi tidak memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pedesaan. Walaupun pemerintah Indonesia, Mongolia dan Thailand telah membuat kemajuan besar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengungkapan informasi lingkungan, akan tetapi pada praktiknya masyarakat pedesaan dan marjinal belum

mendapatkan informasi sebagaimana mereka kehendaki. Lemahnya pelaksanaan peraturan yang berlaku terkait pengendalian polusi serta kurangnya data yang tersedia untuk limbah cair merupakan tantangan besar dalam tata kelola sekaligus menghambat upaya yang dibutuhkan guna menekan pencemaran air dan memenuhi kebutuhan akan air bersih yang semakin meningkat.

Temuan-temuan ini berfungsi sebagai seruan bagi pemerintah, masyarakat sipil, donor internasional dan lembaga lain yang bekerja menyediakan akses informasi yang dibutuhkan. Penyelesaian ketidakadilan lingkungan ini menuntut pemerintah agar memikirkan ulang pendekatan yang mereka lakukan untuk mengungkapkan data polusi air dan informasi lingkungan secara luas kepada publik.

Pemerintah di banyak negara mendalami cara baru untuk berbagi informasi dengan rakyatnya. Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini beserta model-model praktik yang baik dapat memberikan masukan bagi penelitian dan aksi kebijakan inovatif masa depan. Hal ini dapat membantu pemerintah Indonesia, Mongolia dan Thailand mengembangkan upaya yang sudah dilakukannya. Upaya yang menjadi prioritas antara lain adalah menelusuri kebutuhan informasi spesifik dari masyarakat, menciptakan platform teknologi informasi terpusat untuk menyatukan dan menyebarluaskan data fasilitas lingkungan setempat, serta menyediakan informasi yang dapat diakses secara luring (offline) dan dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat. Upaya demikian ini dapat membantu memenuhi kebutuhan akan informasi yang mereka butuhkan guna melindungi diri dari pemanfaatan air yang tercemar, yang dapat merugikan kesehatan dan mata pencaharian ekonomi mereka.

Bagi masyarakat termiskin dunia, akses air bersih akan semakin mengurangi serangan penyakit mematikan, menghemat waktu siswa keluar jauh dari ruang kelas untuk mengumpulkan air, dan membuka lebih lebar kesempatan ekonomi bagi perempuan. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik, kepercayaan dan tindakan kolektif agar dapat mengurangi polusi air dan memperluas akses air bersih kepada miliaran orang yang mengonsumsi air tidak bersih. Hal ini dapat dicapai atas dasar transparansi yang baik. Semua orang harus memiliki akses terhadap informasi yang mereka butuhkan agar dapat bersuara dalam gerakan keadilan air.



Andrew Steer
Presiden, World Resources Institute

SOROTAN LAPORAN

- Pesatnya pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang telah meningkatkan jumlah bahan pencemar yang memasuki aliran air di seluruh dunia, dengan konsekuensi yang mengerikan bagi masyarakat miskin yang hidup ketergantungan pada air demi kesejahteraan mereka dalam hal kesehatan dan ekonomi.
- Laporan ini menelusuri tantangan yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia, Thailand dan Mongolia tatkala mereka berjuang memperoleh informasi mengenai polusi dan mengkaji berbagai peraturan dan cara yang dapat ditempuh di setiap negara, yang mengatur pengungkapan informasi tentang pencemaran lingkungan.
- Temuan yang kami dapatkan menunjukkan belum tersedianya informasi spesifik yang masyarakat kehendaki mengenai perusahaan setempat. Walaupun peraturan perundang-undangan secara keseluruhan jelas-jelas mewajibkan pengungkapan informasi lingkungan, lemahnya implementasi dan rumitnya mekanisme yang ada menghalangi akses masyarakat mendapatkan informasi yang mereka kehendaki.
- Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah Indonesia, Thailand dan Mongolia dapat meningkatkan implementasi peraturan yang ada dan mengembangkan sistem terpusat untuk pengungkapan informasi, baik dalam bentuk daring (online) maupun luring (offline) yang dapat diakses secara lokal.
- Donor harus mendukung upaya masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan informasi, sedangkan kelompok masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan mengenai tata kelola air.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di seluruh dunia, jutaan orang berjuang mendapatkan air bersih untuk mandi, masak, dan kebutuhan mata pencaharian.

Namun walaupun kaitan antara pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat sudah tercatat dengan baik, pihak pembuat kebijakan masih kesulitan menerapkan kebijakan dan tindakan efektif guna menanggulangi dampak pencemaran air yang semakin meningkat terhadap lingkungan. Di saat yang bersamaan, masyarakat sering kali harus berjuang mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka akan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat pencemaran air setempat, termasuk kepatuhan pada standar yang ada. Walaupun lembaga pemerintah umumnya diharuskan mengungkapkan informasi tentang tingkat pencemaran air, informasi ini seringkali tidak mencapai masyarakat pedesaan.

Lemahnya keterbukaan informasi lingkungan merupakan persoalan yang sangat penting, khususnya di Asia Tenggara.

Perkembangan pesat di daerah yang secara tradisional merupakan kawasan pedesaan telah berdampak besar bagi masyarakat miskin dan marjinal yang hidupnya bergantung pada sungai dan sumber air alami lainnya. Meskipun masyarakat tersebut membutuhkan air bersih untuk bertani, memancing, dan memelihara ternak yang merupakan sumber mata pencaharian mereka, mereka sering kali tidak mengetahui apakah air mereka aman untuk digunakan. Mereka kadang berjuang cukup lama menanggapi permasalahan pencemaran tanpa membuahkan hasil positif, mencoba berulang kali mendapatkan informasi mengenai praktik perusahaan dan melibatkan aparat pemerintah dalam kepatuhan dan penegakan hukum.

Di Indonesia, petani udang di Serang, Jawa Barat adalah saksi penurunan kondisi Sungai Ciujung selama 20 tahun saat pabrik pulp dan kertas dan tekstil beroperasi di wilayah mereka.

Masyarakat melakukan aksi protes, menyampaikan petisi kepada dinas yang berwenang, bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan atas dampak yang mereka alami akibat penurunan kualitas air serta menuntut

pertanggung jawaban dari perusahaan pelaku pencemaran sungai. Tetapi bahkan setelah hasil audit Kementerian Lingkungan Hidup mengenai kontributor limbah utama menemukan berbagai masalah dalam praktik pabrik sekalipun, hasil tangkapan udang nelayan sudah kadung menurun drastis, dan sungai tetap tercemar.

Masyarakat yang mendiami daerah Wat Nong Fab, Thailand, dekat kawasan industri Map Tha Phut khawatir bahwa pencemaran air berdampak pada kesehatan mereka.

Berbagai fasilitas petrokimia dan perusahaan lain membuang limbahnya ke aliran air tanah, sehingga mencemari sumur dan aliran yang menjadi sumber air minum dan pertanian masyarakat. Walaupun masyarakat curiga pencemaran sudah berada pada tingkat membahayakan, mereka tidak dapat membuktikan tuntutan untuk ini dan kesulitan mengakses data fasilitas polusi air setempat milik kementerian.

Di Mongolia, peternak yang tinggal di luar ibukota yang berkembang pesat, Ulaanbaatar, mencemaskan drastisnya penurunan kualitas air Sungai Tuul yang membuat ternaknya sakit.

Konsumen memprotes rasa daging yang mereka beli. Para peternak meyakini bahwa tambang kerikil dan pengolahan air limbah kota yang buruk membuang bahan pencemar ke badan air. Tetapi tanpa adanya catatan tentang pencemaran air atau informasi umum mengenai perusahaan pemilik tambang di sekitarnya, peternak harus berjuang mencari dasar bagi kekhawatiran mereka untuk disampaikan kepada petugas pemerintah. Selain itu mereka juga tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk mencoba menghentikan semakin menjamurnya tambang yang dibangun di wilayah mereka.

Kasus-kasus ini menggambarkan hal-hal yang bisa saja terjadi jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan mengenai sumber dan dampak polusi dari fasilitas setempat. Meski bukanlah satu-satunya persyaratan penting, akses terhadap informasi yang lengkap, tepat waktu, akurat dan komprehensif, akan memastikan agar masyarakat miskin dan marjinal memiliki pengetahuan dan

kekuatan yang mereka butuhkan untuk melindungi air yang mereka gunakan. Akses terhadap informasi dapat meningkatkan kemampuan mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah serta membantu membentuk kebijakan dan praktik yang melindungi kesehatan, kesejahteraan dan akses mereka terhadap air bersih.









Tentang Laporan Ini

Tujuan World Resources Institute (WRI) adalah memahami dan membantu memitigasi hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses informasi lingkungan.

Kami bekerja bersama mitra masyarakat sipil untuk menerapkan Proyek Penguatan Hak atas Informasi bagi Masyarakat dan Lingkungan (*Strengthening the Right to Information for People and the Environment* atau STRIPE) di Indonesia, Thailand dan Mongolia. Secara spesifik, WRI bermitra dengan lembaga berikut: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), WALHI/Friends of the Earth Indonesia, dan MediaLink (Indonesia); Thailand Environment Institute dan Eastern People's Network (Thailand), serta Center for Human Rights Development, Patrons of Khuvsgul Lake, Environment and Health Center, dan Transparency Foundation (Mongolia). Semua lembaga ini adalah anggota The Access Initiative, yakni jaringan masyarakat sipil yang bekerja untuk proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <http://www.accessinitiative.org>.

Laporan ini merangkum temuan dari penyelidikan yang dilakukan selama tiga tahun terhadap efektivitas pendekatan yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia, Thailand dan Mongolia melalui hukum yang berlaku, dalam hal keterbukaan informasi dan data mengenai kualitas dan pencemaran air. Laporan ini mengkaji pendekatan yang diterapkan ketiga negara tersebut dalam membuka informasi secara proaktif dan reaktif melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur hak atas informasi. Laporan ini juga mendokumentasikan keadaan buruk yang dihadapi masyarakat di masing-masing negara dalam mendapatkan dan menggunakan informasi untuk mengatasi persoalan pencemaran air

Table ES-1 | Rangkuman Akses Masyarakat terhadap Informasi yang Mereka Kehendaki: Pengungkapan secara Proaktif Berdasarkan Peraturan dan pada Praktiknya, serta secara Reaktif Berdasarkan Permintaan

Informasi yang Dikehendaki Masyarakat	INDONESIA			THAILAND			MONGOLIA		
	Diungkapkan secara proaktif berdasarkan peraturan yang berlaku	Diungkapkan secara proaktif pada praktikanya	Disediakan berdasarkan permintaan	Diungkapkan secara proaktif pada praktikanya	Diungkapkan secara proaktif pada praktikanya	Disediakan berdasarkan permintaan	Diungkapkan secara proaktif berdasarkan peraturan yang berlaku	Diungkapkan secara proaktif pada praktikanya	Disediakan berdasarkan permintaan
 Informasi spesifik terkait perusahaan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Informasi tentang bahan pencemar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Dokumen Perizinan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Kualitas air	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Upaya Pembersihan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Dampak pada kesehatan masyarakat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Dampak pada mata pencaharian	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Ecosystem impacts	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = ya ● = terbatas ● = tidak ● = tidak berlaku

setempat. Kami berharap laporan ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat sipil, pemerintah dan pihak lainnya yang terkait, yang menjelaskan betapa sangat pentingnya akses terhadap informasi bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan yang menghadapi ancaman terhadap air mereka. Selain itu, kami juga hendak menunjukkan cara yang digunakan negara berkembang dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan warganya mengenai pencemaran.

Temuan Kunci

Masyarakat setempat masih menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses informasi lingkungan. Permasalahan tetap masih ada walaupun pemerintah Indonesia, Thailand dan Mongolia sudah memiliki peraturan yang menyeluruh, yang mewajibkan pengungkapan informasi sebagaimana disebutkan. Hambatan berupa tidak lengkapnya pelaporan informasi lingkungan oleh pemerintah serta pengungkapan untuk menjawab permintaan publik. Pada akhirnya, penerapan yang lemah terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transparansi akan menghalangi akses publik terhadap sumber informasi vital mengenai pencemaran lingkungan.

Dibutuhkan suatu basis data informasi yang terpusat serta penyediaan informasi setempat. Pengungkapan informasi fasilitas secara proaktif dan rutin, seperti tentang bahan pencemar yang dibuang ke lingkungan, kualitas air secara keseluruhan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan data kepatuhan di negara kajian masih lemah dan terpisah-pisah, dan mekanisme yang digunakan untuk mengungkapkan informasi tidak menyediakan akses yang membantu masyarakat pedesaan.

Warga yang mengajukan permintaan informasi lingkungan masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai dan cara mengaplikasikan peraturan perundang-undangan tentang hak atas informasi, perlunya melakukan perjalanan ke kantor pemerintah dan membayar akses terhadap beberapa dokumen tertentu, keterbatasan akses internet untuk mendapatkan informasi secara daring (online) dan, dalam berbagai kasus, fakta



bahwa informasi kesehatan dan lingkungan setempat yang terkait tidak dapat diakses publik. Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai hak atas informasi, hanya sedikit informasi fasilitas dan kesehatan yang berhasil diperoleh para mitra STRIPE melalui permintaan kepada kementerian.

Rangkuman pada Tabel ES-1 menunjukkan bahwa, walaupun sudah ada kemajuan yang jelas dalam pengembangan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pengungkapan informasi lingkungan secara proaktif dan reaktif, akan tetapi pada praktiknya sistem ini membuat masyarakat mendapatkan informasi yang mereka kehendaki.

Rekomendasi

Pemerintah lain di banyak negara di seluruh dunia bereksperimen dengan cara baru guna memperluas akses terhadap informasi lingkungan dalam berbagai bentuk agar dapat menjangkau publik yang lebih luas. Untuk memastikan agar masyarakat miskin ikut dilibatkan dan lebih mampu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan pencemaran air dan berpartisipasi dalam pengembangan solusi pengelolaan kualitas air, kami mengajukan rekomendasi sebagai berikut kepada pemerintah, masyarakat sipil dan donor.

Penuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Setempat

Pemerintah Indonesia, Thailand dan Mongolia harus mengidentifikasi dan menyatukan kebutuhan informasi masyarakat setempat. Karena kerangka keterbukaan informasi yang ada saat ini tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus menggunakan survei dan alat pengumpulan data lainnya agar dapat lebih memahami data dan dokumen spesifik yang dikehendaki masyarakat dan bagaimana cara yang mereka kehendaki dalam mengakses informasi tersebut.

Pemerintah Indonesia, Thailand dan Mongolia harus memprioritaskan pembangunan sistem terpusat untuk sintesis dan pengungkapan informasi fasilitas lingkungan secara proaktif. Ada banyak badan pemerintah, baik tingkat nasional maupun daerah, yang mengawasi peraturan mengenai kualitas dan pencemaran air. Ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah dan masyarakat yang hendak mengetahui alur pengumpulan, pengelolaan, dan pengungkapan informasi pencemaran lingkungan. Dikarenakan adanya permintaan terhadap informasi serta dokumen dan data spesifik terkait fasilitas, yang ditempatkan dalam cakupan lokal, titik atau lembaga pusat menjadi hal yang dibutuhkan. Badan ini bertanggung jawab mengembangkan dan memonitor standar pelaporan yang seragam untuk pengumpulan, penyatuan dan penyebaran informasi lingkungan serta mengawasi penerapannya di berbagai lembaga kementerian dan wilayah.

Pemerintah Indonesia, Thailand dan Mongolia harus memprioritaskan penyebarluasan kategori dokumen dan data lingkungan secara spesifik di portal data yang ada. Ketiga pemerintah ini mengeluarkan berbagai data lingkungan melalui portal data pada laman situs web. Akan tetapi informasi ini tidak



lengkap atau sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, serta tidak mencakup dokumen fasilitas setempat sebagaimana dikehendaki masyarakat. Dengan disediakannya tautan laporan pemantauan kualitas air, kajian kesehatan masyarakat, izin pembuangan limbah fasilitas, serta laporan kepatuhan dan penegakan hukum melalui portal data, maka hal ini akan mempermudah akses bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pemerintah harus memperluas pengungkapan informasi dalam bentuk yang dapat diakses secara luring (*offline*) dan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat setempat.

Upaya semacam ini akan melengkapi akses yang lebih luas melalui portal data daring. Banyak masyarakat yang tidak menikmati kemudahan akses terhadap internet dan sering kali membutuhkan dukungan agar dapat memahami data dan dokumen lingkungan teknis yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Pemerintah, dengan bantuan masyarakat sipil, harus menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat dan lengkap dalam bentuk yang dapat mudah dimengerti dan diakses oleh publik. Ini dapat mencakup pusat informasi masyarakat, buku panduan, penggunaan tanda sederhana, atau laporan di media lokal, pertemuan masyarakat, aplikasi telepon genggam, dan peringatan kualitas air lewat radio.

Tingkatkan Pelaksanaan

Pemerintah harus meningkatkan kapasitas staf kementerian melalui pengisian jabatan dan pelatihan. Temuan kami menyoroti adanya dampak negatif yang berasal dari peraturan dan prosedur hak atas informasi. Pemerintah harus berinvestasi dalam sumber daya manusia dan finansial yang dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan yang efisien dan efektif dalam kerangka kerja pengungkapan informasi secara legal. Peningkatan kapasitas harus meliputi pelatihan staf kunci di pemerintahan tentang proses dan prosedur yang dibutuhkan dan dalam membantu masyarakat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas informasi serta sistem banding untuk memastikan adanya akses langsung terhadap informasi terkait.

Peningkatan pelaksanaan secara sistematis akan menciptakan proses yang lebih efisien dan efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang dikehendaki.



Tingkatkan Dialog dan Kerja Sama/Pelibatan

Pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan swasta, BUMN, masyarakat sipil, dan masyarakat. Kerja sama yang lebih luas akan meningkatkan jangkauan informasi tentang polusi yang dapat perusahaan bagi dengan lembaga pengelola dan masyarakat mengenai operasi, perbaikan dan tantangan yang mereka hadapi. Masyarakat menghendaki lebih banyak lagi informasi mengenai perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Penyediaan lebih banyak informasi akan menawarkan kesempatan dialog kepada perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum dalam pengendalian pencemaran, serta memfasilitasi solusi kerja sama yang akan melindungi pertumbuhan ekonomi dan lingkungan.

Anggota masyarakat dan masyarakat sipil harus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pengelolaan kualitas air pada tingkat nasional dan daerah. Temuan kami menyoroti pentingnya memberdayakan masyarakat dalam mendorong upaya pembersihan.

Jika diberdayakan, masyarakat menjadi dapat berpartisipasi dengan lebih baik dalam forum pengambilan keputusan mengenai persoalan kualitas air setempat. Dengan adanya informasi yang relevan untuk mendukung advokasi mereka, masyarakat akan mampu menuntut pengelolaan polusi dengan lebih baik serta pelibatan dalam pembahasan kebijakan. Masyarakat sipil dapat mendukung dan membangun kapasitas masyarakat daerah/setempat dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi lingkungan agar dapat membuat pemerintah lebih bertanggung jawab. Masyarakat harus terus menuntut informasi dan partisipasi dalam keputusan tata kelola air yang teramat penting ini.

Donor internasional yang berinvestasi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) terkait air harus memperbesar dana bagi masyarakat sipil, kelompok masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan dan penggunaan informasi. Momentum politik seputar SDG menciptakan peluang baru dalam memperluas kemitraan multipihak dan memastikan agar kerangka kerja pengungkapan yang proaktif semakin ditingkatkan dan digunakan sebagai alat pelaksanaan untuk mencapai sasaran-sasaran terkait air dalam SDG. Masyarakat sipil dan donor harus memanfaatkan ini untuk mendukung masyarakat dalam upaya mereka memperoleh dan menggunakan dokumen dan data untuk mengatasi kekhawatiran setempat. Kegiatan spesifik yang didanai donor dapat mencakup upaya untuk menerjemahkan informasi teknis ke dalam format yang lebih mudah dimengerti, melakukan advokasi untuk akses yang lebih luas terhadap dokumen fasilitas, dan bekerja menggunakan informasi yang diperoleh untuk menangani dampak lingkungan dan sosial ekonomi terkait titik sumber pencemaran air.



LAMPIRAN: MITRA STRIPE

Lampiran ini menjelaskan lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam kemitraan STRIPE di Indonesia, Thailand dan Mongolia.

Indonesia

Indonesian Center for Environmental Law: Didirikan pada tahun 1993, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law ICEL*) menangani prioritas pembangunan Indonesia dengan berfokus pada pembangunan ekonomi yang merugikan lingkungan dan mengabaikan kebutuhan masyarakat yang kehidupannya tergantung pada sumber daya alam. Tujuan ICEL adalah mereformasi kebijakan untuk mendukung perlindungan lingkungan seraya meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat. ICEL bekerja melakukan riset, advokasi dan pengembangan kapasitas dalam bidang kebijakan lingkungan, pengelolaan hutan, keterbukaan informasi publik, hakim-hakim yang berwawasan dan berkapasitas menangani perkara lingkungan ('green bench' atau pengadilan hijau), pertambangan dan keanekaragaman hayati.

WALHI/Friends of The Earth Indonesia: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) didirikan pada tahun 1980 dan bergabung dengan Friends of the Earth pada tahun 1989. WALHI adalah LSM terbesar dan tertua di Indonesia. WALHI menyatukan lebih dari 479 LSM dan 156 individu di seluruh kepulauan Indonesia dengan kantor independen dan konstituen akar rumput di 27 dari 31 provinsi. Nawala WALHI diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. WALHI bekerja dalam beragam isu, termasuk di antaranya konflik agraria tentang akses terhadap sumber daya alam, hak masyarakat adat dan petani, pesisir dan laut, dan deforestasi. WALHI juga menangani beberapa persoalan lintas sektoral seperti perubahan iklim, isu perempuan, dan pengelolaan risiko bencana.

MediaLink: MediaLink adalah LSM yang fokus pada isu-isu kebebasan media dan demokratisasi informasi. Lembaga yang didirikan pada tahun 2010 ini bertujuan memperkuat demokrasi dengan mendorong arus informasi yang terbuka dan berkeadilan.

Thailand

Thailand Environment Institute: Institut Lingkungan Thailand (*The Thailand Environment Institute atau TEI*) adalah organisasi lingkungan nirlaba non pemerintah yang bekerja dalam bidang isu lingkungan. TEI berdiri pada bulan Mei 1993 berdasarkan filosofi sebagai penyedia/sumber informasi dan pengetahuan terpercaya dan terkini. Dibentuk atas dasar keyakinan bahwa kemitraan adalah pendekatan paling efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik, TEI melakukan advokasi untuk pendekatan partisipatif demi tanggung jawab lingkungan bersama. Dengan bekerja erat bersama sektor swasta, pemerintah, masyarakat, dan mitra masyarakat sipil lainnya serta akademisi, TEI membantu memformulasikan arahan lingkungan dan mengaitkan antara kebijakan dan tindakan guna mendorong sebesar-besarnya kemajuan lingkungan hidup di Thailand.

Eastern People's Network: Jaringan Masyarakat Timur atau *The Eastern People's Network* adalah organisasi advokasi akar rumput yang bertujuan meningkatkan perhatian kebijakan terhadap dampak sosial dan lingkungan akibat pencemaran Map Ta Phut dengan cara menggelar aksi protes/demonstrasi, mengirim petisi ke pemerintah dan mengajukan tuntutan hukum.

Mongolia

Centre for Human Rights & Development: Pusat Hak Asasi Manusia dan Pembangunan atau *Centre for Human Rights & Development (CHRD)* menyelenggarakan proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan mekanisme dan struktur HAM nasional, meningkatkan efektivitas bantuan asing, memperbaiki kontribusi masyarakat sipil bagi pembangunan negara Mongolia, serta menggunakan mekanisme dan instrumen HAM internasional. Kegiatan lembaga ini dikelompokkan menjadi tiga program, yaitu program memberantas perdagangan manusia, program advokasi, dan program pembangunan berbasis masyarakat.

Patrons of Khuvsgul Lake: Penjaga Danau Khuvsgul atau *Patrons of Khuvsgul Lake (PKL)* bekerja melindungi Danau Khuvsgul yang merupakan danau dengan keadaan tersegar dan terdalam di Asia Tengah. PKL juga merupakan peserta aktif dalam jaringan Publish What You Pay (PWYP) Mongolia dan EITI.

Environment and Health Center: Pusat Lingkungan dan Kesehatan (*The Environment and Health Center*) adalah LSM yang terdiri dari pakar kebersihan lingkungan, ekologi, kimia, toksikologi serta advokat dengan 5 hingga 26 tahun pengalaman di bidang pemerintahan dan lembaga nirlaba. Sejak tahun 2006, lembaga ini mengerjakan proyek untuk 'meningkatkan transparansi terkait pencemaran lingkungan' yang didanai World Resources Institute. Proyek ini berfokus menciptakan transparansi informasi tentang pencemaran lingkungan, meningkatkan tanggung jawab lingkungan masyarakat dan kemampuannya dalam memantau polusi, mendirikan pengelolaan warga di kawasan pemukiman yang terdiri dari rumah tenda (ger), atau kawasan pemukiman ger yang dikelilingi pagar kayu. Peningkatan tanggung jawab masyarakat dan penyampaian pengetahuan merupakan metode penting untuk mengurangi polusi di kawasan pemukiman ger dan meningkatkan kesehatan warganya.

Transparency Foundation: *The Transparency Foundation* atau Yayasan Transparansi didirikan tahun 2007 sebagai LSM yang bekerja dalam bidang pemantauan (monitoring) dan evaluasi terkait anggaran, khususnya pada industri pertambangan, infrastruktur dan organisasi yang didanai oleh publik. Sebagai bagian dari inisiatif akuntabilitas sosialnya, yayasan ini memberikan peringkat transparansi kepada perusahaan-perusahaan industri ekstraktif pada tahun 2007 dan 2008.

DAFTAR ISTILAH

Aimag—Istilah Mongolia yang berarti provinsi atau negara bagian.

AMDAL—Sistem EIA (AMDAL) yang diberlakukan di Indonesia.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)—Proses analisis yang dilakukan lembaga pemerintah untuk mengkaji secara sistematis kemungkinan dampak lingkungan yang terjadi setelah diterapkannya suatu proyek, program dan kebijakan.

Badan usaha milik negara—Badan hukum yang didirikan pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan komersial atas nama pemerintah. Badan tersebut bisa sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah, dan biasanya ditujukan untuk bergerak pada bidang komersial.

Daftar penglepasan dan transfer bahan pencemar—*Pollutant release and transfer register* (PRTR) adalah basis data atau kumpulan informasi lingkungan nasional atau regional tentang bahan kimia dan/atau bahan pencemar berpotensi berbahaya yang dilepaskan ke udara, air dan tanah, dan dipindahkan ke luar fasilitas untuk pengolahan atau pembuangan.

Fase pengaturan—Sistem persyaratan legal yang mengatur, memantau dan menegakkan penglepasan bahan pencemar ke dalam lingkungan. Fase ini biasanya mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur standar, AMDAL, perizinan, pemantauan, kepatuhan dan penegakan hukum.

Izin—Dokumen legal yang diterbitkan untuk suatu fasilitas tertentu yang mengendalikan kuantitas dan kualitas polutan tertentu yang dilepaskan ke udara atau air.

Izin terbuka—Izin yang memastikan agar siapa pun dapat menggunakan, menggunakan kembali, atau mendistribusikan ulang suatu data.

Kandungan amonia-nitrogen—Jumlah nitrogen yang tergabung dalam bentuk amonia atau amonium. Amonia adalah bahan pencemar beracun yang sering dijumpai dalam produk limbah organik cair. Zat ini dapat digunakan sebagai indikator kesehatan badan air. Istilah ini digunakan secara luas dalam sistem pengolahan limbah dan pemurnian air.

Kandungan oksigen terlarut—Istilah ini mengacu pada kandungan oksigen yang terdapat dalam air. Ini merupakan indikator penting dalam mengkaji kualitas air karena kandungan oksigen yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengancam kehidupan akuatik.

Kebutuhan oksigen biologis—Jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan organisme pengguna oksigen untuk mengurai bahan organik yang terdapat dalam suatu sampel air pada suhu tertentu dan selama waktu tertentu.

Kualitas air—Kualitas suatu badan air seperti danau, sungai atau akuifer dalam tanah. Dapat diartikan sebagai jumlah material, seperti tingkat konsentrasi polutan, yang diperbolehkan dalam air.

Media lingkungan—Komponen abiotik alam, yaitu udara, air dan tanah.

Monitoring berjalan—Kajian sistematis jangka panjang mengenai tingkat pencemar dengan cara pengukuran kuantitas dan tipe polutan tertentu di lingkungan.

Pengendalian pencemaran—Serangkaian tindakan pengaturan atau teknis yang diambil untuk membatasi kerusakan terhadap lingkungan akibat pembuangan bahan berbahaya.

Pengungkapan secara proaktif—Suatu skenario di mana pemerintah membuka informasi secara sengaja dan penuh pertimbangan, tidak hanya sebagai respons terhadap permintaan informasi.

Penolakan dengan diam—Tindakan lembaga pemerintah yang tidak merespon permintaan informasi melalui cara apapun.

Peraturan Perundang-Undangn tentang Hak atas Informasi—Ketentuan hukum yang mengizinkan akses publik terhadap informasi dan data yang dikelola pemerintah. Juga disebut peraturan perundang-undangan kebebasan informasi.

PROPER—Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia, yaitu program yang mengumpulkan dan mengungkapkan data kinerja lingkungan tentang fasilitas perusahaan dalam sistem berbasis kode warna.

Soum—Sub divisi administratif tingkat dua di Mongolia yang berada di bawah *aimag* (provinsi); kira-kira setingkat dengan kabupaten.

Standar—Ketentuan hukum yang mengatur jumlah maksimal bahan pencemar yang boleh dilepaskan ke dalam lingkungan. Pada umumnya ketentuan ini dirancang untuk membatasi tingkat bahan pencemar agar tetap berada di bawah ambang yang membahayakan kesehatan manusia.

Sumber titik—Sumber polusi pada tingkat setempat yang tidak bergerak, seperti misalnya suatu pabrik tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada lembaga mitra strategis kami yang memberikan dana inti kepada WRI, yaitu Kementerian Luar Negeri Belanda, Kementerian Luar Negeri Kerajaan Denmark, dan Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Cooperation Agency).

Laporan ini ditulis oleh Elizabeth Moses dan Carole Excell, akan tetapi tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan mitra STRIPE di Indonesia, Thailand dan Mongolia yang menyumbang riset, pengumpulan data, pembangunan kapasitas masyarakat dan masukan analisis yang tak ternilai. Kami haturkan terima kasih kepada Margaretha Quina, Dyah Paramita, dan Rikah Fari (ICEL); Mujtaba Hamdi (Media-Link); Ode Rakhman (WALHI); Somrudee Nicro dan Wannipa Soda (TEI); Suthi Atchasai (Eastern People's Network); B. Enkhtsetseg dan H. Baigalmaa (CHRD); Badamragchaa Purevdorj dan Oyuna Jukov (Open Society Forum); Bayarmaa Byambasuren (PKL); Dolgormaa Lodoisambu (EHC); dan Tserenjav Demberel (Transparency Foundation). Kami juga berterima kasih kepada Joseph Foti yang membantu mengembangkan metodologi pengumpulan data.

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan besar dari Open Society Foundation, yang mencakup The Human Rights Initiative, The Open Society Forum-Mongolia, dan Tifa Foundation Indonesia.

Selama tiga tahun terakhir, peninjau dan penyunting berikut telah berulang kali membaca laporan ini dan memberikan masukan tak ternilai yang memperkuat substansinya. Kami berterima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan tenaga mereka, yaitu Peter Viet, Lisa Johnston, Gaia Larsen, Moushumi Chaudhury, Daryl Ditz, Lalanath De Silva, Mark Robinson, Sophie Boehm, Frances Irwin, Eszter Filippinyi, Mark Stephan, Joe Foti, Kevin Dunion, Margaretha Quina, Somnuck Jommeewasin, dan Oyuna Jukov.

TENTANG WRI

WRI adalah lembaga penelitian independen yang mewujudkan gagasan besar menjadi aksi nyata untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan manusia.

Tantangan Kami

Sumber daya alam merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi saat ini kita menguras sumber daya bumi dalam laju yang tidak berkelanjutan serta membahayakan ekonomi dan kehidupan umat manusia. Manusia bergantung pada air bersih, tanah yang subur, hutan yang sehat, dan iklim yang stabil. Kota yang dapat dihuni dan energi bersih penting bagi planet yang berkelanjutan. Kita harus mengatasi tantangan global yang urgen tersebut pada dekade ini.

Visi Kami

Kami membayangkan akan adanya keadilan dan kesejahteraan di planet ini, dengan didorong oleh pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Kami bercita-cita menciptakan dunia di mana tindakan pemerintah, usaha dan masyarakat bersatu untuk mengentaskan kemiskinan dan menjaga alam dan lingkungan bagi semua.

Pendekatan Kami

COUNT IT (PERHITUNGGAN)

Kami memulai dengan data. Kami melakukan penelitian independen dan menggunakan teknologi terkini untuk membangun pemahaman baru. Analisis kami yang ketat memberikan identifikasi risiko, membuka peluang, dan menghasilkan rekomendasi bagi para pengambil keputusan. Kami memusatkan upaya kami pada ekonomi berpengaruh dan berkembang, di mana masa depan keberlanjutan akan ditentukan.

CHANGE IT (UBAH)

Kami menguji gagasan-gagasan kami dan menggunakan temuan kami untuk menginspirasi aksi nyata dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Kami bekerja dengan para mitra kami untuk menggerakkan perubahan yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Kami membuat tujuan yang dapat diukur dan bertanggung jawab untuk memastikan hasil kerja kami bertahan lama.

SCALE IT (PERLUAS)

Kami tidak berpikir dalam skala kecil. Melalui Signature Initiatives (Inisiatif Khusus) kami, kami menciptakan perubahan yang positif. Kami bekerja dengan para mitra kami dalam membangun jaringan dan memperluas upaya kami di tingkat regional dan global. Kami mengevaluasi keberhasilan kami melalui kebijakan dan aksi perubahan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil yang mampu mempertahankan lingkungan yang sehat serta memperbesar peluang kesejahteraan bagi masyarakat.

TENTANG PENULIS

Carole Excell adalah Direktur Proyek The Access Initiative WRI.

Kontak: cexcell@wri.org

Elizabeth Moses adalah Analis Penelitian II di The Access Initiative di WRI.

Kontak: emoses@wri.org

KREDIT FOTO

Foto sampul, hal. 2 Asian Development Bank; hal. ii, 6, 7 Laura Villadiego; hal. 8 Margaretha Quina/ICEL.

Setiap laporan World Resources Institute merupakan karya ilmiah yang tepat waktu perihal persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. WRI bertanggung jawab penuh untuk memilih pokok kajian dan menjamin kebebasan penulis dan peneliti dalam melakukan penyelidikan. WRI juga meminta serta menanggapi arahan dari dewan penasihat dan pakar pengulas. Namun, semua penafsiran dan temuan yang ada dalam publikasi WRI merupakan tanggung jawab penulisnya, kecuali apabila dinyatakan lain.

Peta disajikan sekedar untuk memberi gambaran dan tidak mencerminkan opini WRI tentang status legal negara atau wilayah apapun atau mengenai delimitasi perbatasan atau batas.





WORLD
RESOURCES
INSTITUTE

10 G STREET NE
SUITE 800
WASHINGTON, DC 20002, USA
+1 (202) 729-7600
WWW.WRI.ORG

ISBN 978-1-56973-922-8